

DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim, 2008. **Mereduksi Kemiskinan, Sebuah Proposal Baru untuk Indonesia**. Makassar: Nala Cipta Litera.
- Bappenas dan Departemen Keuangan RI. 2009. **Buku Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran**. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Keuangan RI.
- Bappenas, 2009. **Kerangka Pemikiran Reformasi Perencanaan dan Penganggaran**. Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Chamber, Robert. 1988. **Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang**. Jakarta: LP3ES
- Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Direktorat. 2008. **Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja**. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti, dkk. 2019. **Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah**. Depok: Rajawali Pers.
- Halim, Abdul, Dkk. 2019. **Pengelolaan Keuangan Daerah**. Jakarta: UPP STIM YKPN
- Madjid, Noor Kholis. 2014. **“Konsepsi Perencanaan dan Penganggaran” Bahan Ajar: Materi Diklat Perencanaan dan Penganggaran bagi Kassubag Umum**. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan RI.
- Mawardi, Sulton dan Sunardo Sumarto. **Kebijakan Publik yang Memihak Orang Miskin (Fokus: *Pro-Poor Budgeting*)**. SMERU, Maret 2003.
- Mulyana, Budi. 2010. **“Perencanaan dan Penganggaran Daerah”. Materi Diklat Akuntansi dan Keuangan Daerah**. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan RI.
- Nursini, Dkk. 2018. **“Implementasi Pro Poor Budgeting dalam Penanggulangan Kemiskinan: Kasus Pemerintah Daerah di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia”**. Makassar: Jurnal Internasional Ekonomi dan Masalah Keuangan.

Nursini, 2020. **“Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pengentasan Kemiskinan : Bukti Empiris dari Indonesia”**. Makassar: Jurnal Internasional Ekonomi dan Masalah Keuangan.

Robinson, Marc dan D. Last. 2009. **A Basic Model of Performance-Based Budgeting. Technical Notes anda Manuals**. Washington:International Monetary Fund.

Robinson, Marc and J. Brumby. 2005. **“Does Performance-Based Budgeting Work?: An Analytical Review of the Emperical Literature”**. IMF Working Paper 05/210. Whasington: International Monetary Fund.

Shah, Anwar and Chunli Shen. 2007. **Citizen-Centric Performance Budgeting at the Local Level. Public Sector and Governance and Accountability Series: Local Budgeting**. World Bank.

Sjafririzal. 2017. **Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi**. Depok: Rajawali Pers.

Todaro, Michael P. 2011. **Pembangunan Ekonomi. Edisi kesebelas Jilid 1** Jakarta: Erlangga.

Todaro, Michael P. 2011. **Pembangunan Ekonomi. Edisi kesebelas Jilid 2** Jakarta: Erlangga.

Uji Hantara, Agus. 2006. **“Analisis Sistem Penganggaran Pendekatan Kinerja dalam Penyusunan APBD Kota Bogor”**. Tesis, Fakultas Ekonomi, Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Jakarta.

Young, Richard D. 2003. **Performance-Based Budget Systems. Public Policy and Practice. University of South Carolina: Institute For Public Service and Policy Reseach**.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang **Keuangan Negara** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang **Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang **Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang **Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang **Dana Perimbangan** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang **Pengelolaan Keuangan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang **Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang **Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.)2/2017 tentang **Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga**